

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN ASET  
YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 282/Pdt.G/2013/PN.Bks.)**

**Ahmad Juwaini**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Email : ahmad.juwaini@gmail.com

**ABSTRAK**

Yayasan Dompot Dhuafa Republika (YDDR) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional. Untuk melaksanakan berbagai programnya, YDDR memiliki dan mengelola berbagai aset, antara lain tanah dan bangunan. YDDR mendapatkan hibah dari PT. Syirkah Usaha Bersama (PT. SUB) berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, seluas 252 m<sup>2</sup>. PT. SUB mendapatkan tanah dan bangunan tersebut melalui pembelian dari PT. Putra Alvita Pratama (PT. PAP). Karena pembelian itu pembayarannya diangsur, maka proses jual beli itu dituangkan dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). Setelah pembayaran itu lunas, PT. SUB menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada YDDR. Saat YDDR akan membalik nama tanah dan bangunan tersebut, mengalami kesulitan. Menghadapi masalah ini, YDDR mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Bekasi dengan Tergugat I adalah PT. PAP dan Tergugat II PT. SUB. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan aset dan upaya yang dilakukan setelah mekanisme penyelesaian sengketa itu ditempuh.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk selanjutnya data dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual beli antara PT. PAP dengan PT. SUB dengan menggunakan PPJB setelah dipenuhinya syarat-syarat adalah mengikat, dan hibah yang dilakukan oleh PT. SUB kepada YDDR adalah sah, karena telah dilengkapi semua dokumen hibah yang diperlukan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi melalui mekanisme keputusan Verstek mengabulkan gugatan Penggugat. Selanjutnya YDDR membuat Akta Jual beli dan mendaftarkan kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional Bekasi. Akhirnya pada sertifikat tanah tercantum bahwa pemilik tanah tersebut, adalah YDDR.

Kata Kunci : Sengketa, Kepemilikan, Tanah, Hibah

# **SETTLEMENT OF ASSET OWNERSHIP DISPUTE**

## **DOMPET DHUAFA REPUBLIKA FOUNDATION (CASE STUDY OF VERDICT NO. 282/Pdt.G/2013/PN.Bks.)**

**Ahmad Juwaini**

Faculty of Law, University of Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Email : ahmad.juwaini@gmail.com

### **ABSTRACT**

PT. Syirkah Usaha Bersama bought land and buildings from PT. Putra Alvita Pratama that are located in West Java Province, Bekasi Regency, Bantar Gebang District, Cimuning Village, covering an area of 252 M2. Because the purchase is paid in installments, the buying and selling process is outlined in the Sale and Purchase Agreement. Furthermore, PT. Syirkah Usaha Bersama donated the land and building to the Dompot Dhuafa Republika Foundation. When the Dompot Dhuafa Republika Foundation was about to reverse the name of the land and building, it encountered difficulties. In dealing with this problem, Dompot Dhuafa Republika Foundation filed a civil suit at the Bekasi District Court with PT. Putra Alvita Pratama as Defendant I and PT. Syirkah Joint Venture as Defendant II. This research aims to determine the mechanism for dispute settlement of asset ownership and the efforts made after the dispute settlement mechanism has been adopted. This research is a normative and qualitative juridical study with a case study approach, for which data is analyzed by descriptive-prescriptive analysis. The results shows that the dispute resolution mechanism adopted was that the Bekasi District Court Judges decided with Verstek and granted the Plaintiff's claim. Furthermore, Dompot Dhuafa Republika Foundation makes a Sale and Purchase Deed and registers ownership of the land and building at the Bekasi National Land Agency office. Finally, the land certificate states that the land ownership belongs to the Dompot Dhuafa Republika Foundation.

Keyword: Disputes, Ownership, Land, Grants